CITRA POLITIK PEREMPUAN SUNDA

(Studi Kasus Citra Politik Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019)

Oleh :
Deby Sri Aprilliani

Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Email : debysriaprilliani@gmail.com

ABSTRACT

The research intends to find out political image Sundanese women Ineu Purwadewi Sundari chief of the DPRD West Jawa 2014-2019 period). The results of this research show that the political symbol of Sundanese women Ineu Purwadewi Sundari Chairman of DPRD West Java 2014-2019 Period. The three instruments of political symbols, which is the symbol of clothes, the color symbol, language symbol used Ineu Purwadewi Sundari Chairman of DPRD West Java 2014-2019 period. It is said to be "Pseudo political symbol of the Sundanese women" which is a political symbol of false or false. For that, then the political symbols that are "pseudo political symbols" can be regarded as "quasi political symbol" that is a false political symbol. The Orientation is short-term and pragmatic orientation. While the political identity of Sundanese women Purwadewi Sundari Chairman of DPRD West Java 2014-2019 Period can be said "Pseudo political identity" ie pretense or false And how the Sundanes in the political space is no longer used as the basis of life, political identity that should be maintained and implemented In the political space.

Keywords*: Political Image, Sundanese Women, Case Study, Political Symbol, Political Identity.*

ABSTRAK

Penelitian bermaksud untuk mengetahui Citra Politik Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Simbol politik perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 Ketiga instrumen dari simbol politik, yakni simbol pakaian, simbol warna, simbol bahasa, yang dipakai Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dapat dikatakan sebagai "pseudo simbol politik perempuan Sunda" yaitu simbol politik kepura-puraan atau palsu. Untuk itu, maka simbol politik yang bersifat "pseudo simbol politik" akan berbuah pada "quasi simbol politik" yakni simbol politik yang semu. Orientasinya jangka pendek dan pragmatis. Sedangkan Identitas politik perempuan Sunda Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 dapat dikatakan "pseudo identitas politik" yakni kepura-puraan atau palsu serta bagaimana ke-Sundaan dalam ruang politik tidak lagi dijadikan landasan hidup. Identitas politik yang seharusnya dipelihara dan di implementasikan pada ruang politik.

Kata Kunci : Citra Politik, Perempuan Sunda, Studi Kasus, Simbol Politik, Identitas Politik.

1. Pendahuluan

Citra politik Ineu Purwadewi Sundari sebagai politisi perempuan Sunda yang menjabat Ketua DPRD Jawa Barat sadar maupun tidak disadari akan merepresentasikan nilai-nilai kesundaan, karena sosok Ketua DPRD Jawa Barat merupakan representasi dari keterwakilan masyarakat Jawa Barat. Dimana sosok Ineu Purwadewi Sundari yang menjabat sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat akan memunculkan nilai-nilai lokalitas budaya Sunda yang melekat pada masyarakat dan dirinya. Sosok Ineu Purwadewi Sundari sebagai politisi perempuan Sunda merupakan representasi dari masyarakat Sunda pada saat ini.

Studi kasus Citra Politik perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019 menarik untuk diteliti karena, **pertama**, alih-alih memunculkan simbol politik dalam ruang politik sadar maupun tidak disadari merepresentasikan lokalitas ke Sundaan. Dalam komunikasi politik dikenal dengan dua simbol yakni *tangible symbol* atau simbol yang nampak, serta *itangble symbol* Dari segi penggunaan bahasa dalam komunikasi politik, bahasa mempunyai peranan yang penting sebagai instrument penghubung dalam aktivitas politik. Simbol politik yang melekat pada Ineu Purwadewi Sundari sepanjang peneliti mengamati dibalut dengan simbol perempuan Sunda modern serta memunculkan simbol-simbol budaya sunda baik itu simbol verbal maupun nonverbal. Politik simbol kesundan tersebut akan terus melekat pada individunya dalam hal ini Ineu Purwadewi Sundari.

Kedua, keunikan terjadi pada dinamika politik lokal yang terjadi di Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari merupakan perempuan Sunda pertama yang menduduki posisi sebagai Ketua definitif DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, dimana Ineu merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Jawa Barat pada pemilihan legislatif tahun 2014, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan partai politik pemenang suara terbanyak sehingga berhak mengajukan anggota legislatifnya menjadi Ketua DPRD Jawa Barat.

Ketiga, posisi Ineu Purwadewi Sundari sebagai Ketua DPRD Jawa Barat harus membagi perannya sebagai istri dan juga ibu diranah domestik. Peran ganda tersebut mengonstruksi posisi perempuan, dalam masyarakat sebagaimana yang seringkali diucapkan: semaju-majunya perempuan di luar rumah, satu kakinya tetap terikat di dalam rumah. Realitas tersebut menganggap kerja ganda merupakan kodrat perempuan. Selain itu, dalam konstruksi sosial menempatkan perempuan berada pada posisi the second class (kelas kedua) menjadi momok bagi perempuan Sunda untuk terjun ke dunia politik.

Keempat, dalam proses sosio kultural di Jawa Barat posisi perempuan Sunda dituntut untuk memenuhi tiga aspek yang sangat umum dikostruksikan oleh masyarakat Sunda, yakni, sumur, dapur, dan kasur. Oleh karena itu, dengan adanya diktum tersebut seolah-olah perempuan menjadi tabu untuk berkarier, apalagi berkiprah dalam dunia politik. Berdasarkan Keempat kategori diatas tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimana proses pembentukan citra politik perempuan Sunda Ineu

Purwadesi Sundari ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019. Mencermati hal tersebut, bagaimana perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari tidak hanya bicara penguatan citra politik. Serta harus mampu mendistribusikan nilai-nilai materil maupun non materil bagi kepentingan masyarakat Sunda khususnya Jawa Barat dalam konsolidasi demokrasi lokal.

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Bagaimana Citra Politik Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014 – 2019.

Untuk lebih fokusnya maka permasalahan dijelaskan di rumusan masalah mikro di bawah ini :

1.2.2. Rumusan Masalah Mikro

Adapun pertanyaan penelitian yang diangkat berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas dalam penelitian ini antara lain berkenaan dengan :

1. Apa **Simbol Politik** yang dipakai Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019?
2. Bagaimana **Identitas Politik** yang dipakai Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019?

2. Kerangka Pemikiran

Manfaat dari kerangka pemikiran adalah memberikan arah bagi proses penelitian dan terbentuknya persepsi yang sama antara peneliti dan orang lain (dalam hal ini pembaca, atau orang yang membaca hasil penelitian ini) terhadap alur-alur berpikir peneliti.

Penelitian kualitatif mementingkan perspektif emik, dan bergerak dari fakta, informasi atau peristiwa menuju ketingkat abstraksi yang lebih tinggi (apakah itu konsep ataukah teori) serta bukan sebaliknya dari teori atau konsep ke data atau informasi.

Perspektif atau teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab fenomena komunikasi adalah dengan Teori Interaksi Simbolik dari G.H Mead & Herbert Blumer.

Interaksi Simbolik mengakui bahwa interaksi adalah suatu proses interpretatif dua arah. Salah satu fokus interaksi simbolik efek interpretasi terhadap orang yang tindakannya sedang diinterpretasikan. Salah satu kontribusi teori ini, seperti dikemukakan Jones (dalam Mulyana, 2002: 106) adalah menjabarkan berbagai macam yang ditimbulkan penafsiran orang lain terhadap identitas atau citra diri individu yang merupakan objek interpretasi.

Dalam penelitian ini didasarakan atas asumsi bahwa ”pembicaraan politik adalah aktivitas simbolik” (Nimmo, 2006:79). Transaksi politik, simbolisme menjadi unsur yang penting dalam pembentukan citra politik. Dalam komunikasi Politik didalamnya dikenal dua macam simbol, yakni *concrete and abstract symbol* (White & Clark, 1988:8). Simbol-simbol kongkrit mengacu pada objek atau sumber daya yang berwujud (tangible resources). Simbol seperti ini dapat diobservasi secara langsung. Sedangkan simbol yang abstrak mengacu pada sumber daya yang tidak terwujud (intangible resources) nilai-nilai sosial tertentu. Bentuk yang spesifik, simbolisasi dalam komunikasi politik akan tampak dalam alat-alat retorika yang digunakan,

seperti metafora. Kehidupan manusia tidak terlepas dari penggunaan simbol-simbol.

3. Metode Penelitian

Metode penelitan menjadi penting, karena pada metode berperan sebagai pisau bedah dari suatu penelitian, dimana akan menemukan akar dari permasalahan dari suatu objek penelitian dengan suatu cara tertentu.

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode yang didasarkan pada interpretasi penulis atau peneliti. Pemilihan metode yang digunakan harus dapat mencerminkan relevansi hingga kepada metode yang digunakan dalam penelitian agar berjalan beriringan yang kesemuanya itu harus sesuai pula dengan permasalah yang di angkat dalam penelitian.

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case studies), mengacu pada John W.Creswell dalam bukunya *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition* bahwa studi kasus sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terikat atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Pada penelitian ini peneliti menerapkan paradigma konstruktivis.

4. Pembahasan

1. Simbol politik yang digunakan Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.

Simbol politik dalam perspektif komunikasi politik menjadi penting manakala simbol politik menjadi salah satu instrumen yang di gunakan oleh politisi. Simbol politik pun dapat menjadi suatu bentuk penyederhanaan yang efektif ataupun perumpamaan yang merepresentasikan politisi tersebut di dalam penyampaian pesan dari aktor politik kepada masyarakat.

Berdasarkan temuan secara empirik bahwa simbol politik yang digunakan oleh Ineu Purwadewi Sundari yang direpresentasikan dalam ruang-ruang politik baik itu di DPRD, Partai, maupun konstituen. **Pertama**, simbol pakaian. **Kedua**, simbol warna. **Ketiga, simbol** bahasa. Simbolisasi dalam politik itu sangat mempengaruhi masyarakat.

Ketiga instrumen dari simbol politik, yang dipakai Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dapat dikatakan sebagai "pseudo simbol politik perempuan Sunda" yaitu simbol politik kepura-puraan atau palsu. Ketika, Ineu Purwadewi Sundari memproduksi simbol politik ini dijadikan sebagai bentuk penyederhanaan pesan, dari aktor politik kepada masyarakat. Padahal sejatinya dalam politik, simbol politik berperan penting bagi politisi terlepas dari apapun bentuk simbolnya. Mengingat simbol politik dapat menyiratkan sikap politik pemakainya.

Hal itupun mempengaruhi citra politiknya sebagai Ketua DPRD Jawa Barat. Untuk itu, maka simbol politik yang bersifat "pseudo simbol politik" akan berbuah pada "quasi simbol politik" yakni simbol politik yang semu. Orientasinya jangka pendek dan pragmantis. Maka, ketika citra politik tersebut merupakan fusi dari simbol politik serta identitas politk, apa bila

simbol dan identitas politik bersifat semu pada akhirnya akan mempengaruhi citra politiknya.

2. Identitas Politik yang digunakan Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.

Penelitian yang peneliti lakukan berada pada perspektif sosio-kultural. Dalam buku Griffin bersandarkan pada bagaimana bahasa memainkan peran yang sangat penting yang melahirkan budaya dalam kehidupan atau realitas didalam masyarakat, Asumsi dasar persepektif ini ketika orang berbicara sesungguhnya orang tersebut sedang memproduksi budaya, sama halnya dengan penelitian peneliti lakukan, ketika Politisi Perempuan Sunda berbicara dengan menggunakan bahasa (dalam komunikasi simbol adalah bahasa) maka akan terjadi produski dan reporduksi budaya melalui simbol-simbol, melalui bahasa yang digunakan dalam penyampaian pesan sehingga realitas terbangun melalui interaksi dari individu atau aktor politik.

Nilai-nilai keSundaan yang melekat pada masyarakat terkepung dalam bangunan etnofilosofis yang ada di Jawa Barat. Walaupun notabene Jawa Barat sebagai rumah besar yang mewadahi entitas lokal Sunda, sadar maupun tidak disadari bahwa kepungan etnofilosofis mempengaruhi pola dan kehidupan masyarakat Sunda. Kajian empirik menunjukan bahwa identitas politik yang melekat pada Ineu Purwadewi Sundari yang di representasikan dalam ruang-ruang politik baik itu di DPRD, partai, maupun konstituen, peneliti mengidentifikasi bahwa tiga identitas politik yang melekat pada IneuPurwadewi. **Pertama**, identitas Sunda. **Kedua,** identitas Agama Islam. **Ketiga** identitas partai (Ideologi Pancasila 1 Juni).

Praktiknya, harus diakui secara jujur terjadi ekspoitasi atas identitas politik. Dapat dikatakan "Pseudo identitas politik" yakni kepura-puraan atau palsu manakala Ki Sunda sebagai *local genius* tidak di implentasikan sebagai subjek tindakannya, sebagai pribadi yang berpijak sepenuhnya pada nilai-nilai ke-Jawa Baratan atau ke-Sundaan, yang dituangkan dalam ide, gagasan, serta kebijakan dengan dasar merasakan, mencintai keIndonesiannya sendiri. Serta bagaimana keSundaan dalam ruang politik tidak lagi dijadikan landasan hidup, identitas politik yang seharusnya dipelihara dan di implementasikan hanya di eksploitasi untuk kepentingan pragmantis.

3. Citra Politik Perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019.

Citra politik pun harus mampu melekat pada hal yang baik, bukan hanya sekedar sebuah manipulasi diri agar nampak baik di mata publik. Ketika politisi memiliki citra politik yang baik maka elektabilitas dimasyarakat akan kuat, lain halnya ketika citra politiknya buruk maka akan berdampak pada elektabilitas, bahkan sampai pada tingkatan popularitas, publik pun akan antipati terhadap politisi tersebut.

Berdasarkan penelitian dilapangan peneliti mendapati temuan bahwa Citra politik perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019, citra politik merupakan fusi dari **pertama**, simbol politik dan yang **kedua**, identitas politik.

Bahwa sesungguhnya, citra politik Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat sebagai Perempuan Sunda sudah menjelma menjadi identitas politik Sunda, serta sudah dimanfaatkan dalam ruang politik. sehingga konstruksi yang ada bahwa Ineu Purwadewi Sundari sudah memanfaatkan tentang kesundaan sebagai Identitas Politik dan itu semua merepresentasikan citra poltik kemudian menjelma menjadi politik identitas untuk memperkokoh sebagai Ketua dewan walaupun tidak secara gamblang.

Citra politik yang nampak pada Ineu Purwadewi Sundari di representasikan bahwa Ineu Purwadewi Sundari hanya berupa figur yang merepresentasikan lembaganya dalam hal ini DPRD Jawa Barat, selain itu merupakan perempuan pertama yang menduduki posisi pucuk pimpinan DPRD, dan tergolong politisi muda. Citra politiknya, Ineu Purwadewi Sundari, dihormati karna posisi Ineu Purwadewi Sundari sebagai Ketua DPRD, bukan karna figurnya.

Pragmantisme citra politik manakala simbol politik dan identitas politik hanya dijadikan sebuah eksploitasi bagaimana nilai-nilai ke-Sundaan dalam ruang politik tidak lagi dijadikan landasan hidup yang seharusnya di dipelihara dan diimplementasipan pada ruang tersebut.

Jika Ineu di Citrakan sebagai perempuan Sunda, menurut konsep politik *Tritangtu* yang telah dipaparkan di muka, bahwa *Tritangtu* dapat juga digambarkan pada sosok Ki Sunda kekinian yang berada dalam dimensi persepsi yang varian. Pertama, Ki Sunda yang merupakan *pituin* (asli) orang Sunda. Ia memiliki sekeseler tujuh turunan betul-betul orang Sunda. Kedua, Ki Sunda yang diidentifikasi sebagai orang yang memiliki darah Sunda, baik dari kakek buyutnya atau Bapak/Ibunya. Ketiga, Ki Sunda yang diidentikkan sebagai warga Jawa Barat; ber-KTP Jawa Barat. Datanya jelas dalam DPS/DPT pemilih terbesar, tapi banyak di antara mereka yang genetiknya jelas-jelas bukan orang Sunda pituin; pendatang dari suku lain yang sudah lama di Jawa Barat, bahkan lahir, beranak pinak, makan-minum dari tanah Jawa Barat; berkarya dan mengabdi bagi Jawa Barat.

Dari ketiga dimensi persepsi Ki Sunda itu bahwa Ineu Purwadewi Sundari merupakan varian Kedua, dari konsep politik *Tritangtu* yakni; Ki Sunda yang diidentifikasi sebagai orang yang memiliki darah Sunda, baik dari kakek buyutnya atau Bapak/Ibunya. Dengan demikian, paling tidak Ineu Purwadewi Sundari harus mampu merefleksikan siapa dirinya dan apa yang mencari ciri khasnya sebagai orang Sunda, jika Sunda itu sebagai identitasnya. Seyogyanya citra politik dan kebohongan politik itu berbeda tipis jangan sampai demi memantapkan citra politiknya, semua yang dilakukan dalam ruangruang politik baik itu simbol politik ataupun identitas politik perempuan Sunda hanya bersifat pragmantis, sehingga orientasinya oportunisme semata.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai citra politik perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019, maka dapat dibuat kesimpulan, sebagai berikut:

1. **Simbol politik** yang digunakan perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat

periode 2014-2019. Ketiga instrumen dari simbol politik, yakni simbol pakaian, simbol warna, simbol bahasa, yang dipakai Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 dapat dikatakan sebagai "pseudo simbol politik perempuan Sunda" yaitu simbol politik kepura-puraan atau palsu.

2. **Identitas politik** yang digunakan perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019 terjadi ekspoitasi atas identitas politik. Dapat dikatakan "Pseudo identitas politik" yakni kepura-puraan atau palsu manakala Ki Sunda sebagai local genius tidak di implentasikan sebagai subjek tindakannya, sebagai pribadi yang berpijak sepenuhnya pada nilai-nilai ke-Jawa Baratan atau ke-Sundaan, yang dituangkan dalam ide, gagasan, serta kebijakan dengan dasar merasakan, mencintai keIndonesiannya sendiri.
3. Citra politik perempuan Sunda Ineu Purwadewi Sundari Ketua DPRD Jawa Barat periode 2014-2019. Pragmantisme citra politik manakala simbol politik dan identitas politik hanya dijadikan sebuah eksploitasi bagaimana nilai-nilai ke-Sundaan dalam ruang politik tidak lagi dijadikan landasan hidup yang seharusnya di dipelihara dan di implementasikan pada ruang tersebut, hanya dieksploitasi untuk kepentingan pragmantis.

Daftar Pustaka

Buku

Abdilah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. Magelang : Indonsiatera.

Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Aness. 2007. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik (Paradigma, Teori, Aplikasi, Strategi Komunikasi Politik Indonesia).* Jakarta : PT. Balai Pustaka.

Arifin, Anwar. 2006. *Pencitraaan Dalam Politik:Strategi Pemenangan Pemilu*. Jakarta: Pustaka Indonesia.

Bagir, Zainal Abidin, 2011, *Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia*, Mizan dan CRCS. Bandung-Yogyakarta.

Budiarjo, Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2008. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

Cangara, Hafied. 2004. *Komunikasi Politik*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Castells, Manuel, 2010. *The Power of Identity*. Oxford, UK:Blackwell Publishing Ltd.

Creswell J.W. 1998. *"Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*" by J. W. Creswell.

----------. 2003. *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd ed.).* Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.

----------. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih diantara lima pendekatan.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

De Beauvoir, Simone. 2003. *The Second Sex: Kehidupan Perempuan.* Pustaka Promethea.

Effendy, Onong Uchana. 2003. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Ekadjati, E. 2005. *Kebudayaan Sunda, Suatu Pendekatan Sejarah Jilid 4*. Jakarta : Pustaka Jaya.

Griffin ,EM .2003. *A First Look At Communication Theory*. 5th ed. New York: Mc Graw Hill

Gazali, Effendi. 2004. *Pemuda, Demokrasi & Pendidikan Politik : Tinjauan Komunikasi Politik* , Jakarta : Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Indonesia.

Hikmat, Mahi M. 2010. *Komunikasi Politik: Teori dan Praktik*. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Harun dan Sumarno, 2006. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Bandung : Mandar Maju

Kantaprawira, Rusadi. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung : Sinar Baru Aigensindo.

Koentjaraningrat. 2009. *Ilmu Antropologi* . PT Rineka Cipta : Jakarta

Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Kencana : Jakarta

Kuswarno, Engkus, 2009. *Metode Penelitian Komunikasi, Fenomenologi, Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian.* Bandung : Widya Padjajaran.

Latif, Yudi. 2009. *Dalam Politik Identitas, Agama, Etnis (Widya P. Setyanto, Holomoan Pulungan).* Salatiga : Percik.

Littlejohn, Stephen W., 1996. *Theories of Human Communication*, edisi ke-5, Belmont-California, Wadsworth.

Menair, Brian. 1999. *An Introduction to Political Communication*. London: Libray Cataloguing In Publication.

Miller, David. 1996. *Politik Dalam Perspektif Pemikiran, Filsafat dan Teori*. Jakarta: Rajawali.

Moleong, Lexy J., 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.

Muhtadi, Asep Saeful., 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif*, Penerbit Pustaka LP3ES, Jakarta.

Mulyana, Deddy. 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Rosda Karya.

----------. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi: Contoh-contoh Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis.* Bandung: Remaja Rosdakarya

----------. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, Zulakarimen. 1990. *Komunikasi Politik : Suatu Pengantar*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Nimmo, Dan. 2006. *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan dan Media.* Bandung : PT : Remaja Rosdakarya.

----------. 2006. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Permana,Setia. 2007. *Ki Sunda dan Politik: Reposisi Politik Ki Sunda dalam Kenfigurasi Politik Nasional.* Bandung : Yayasan Indonesia Masa Depan.

Rakhmat, Jalaluddin. 2007. *Metode Penelitian Komunikasi,* Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Rauf, Maswadi. 1993. *Komunikasi Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Rosidi, Ajip. 2016. *Masa Depan Budaya Daerah*. Bandung : PT Dunia Pustaka Jaya.

Saeful, Asep. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia. Bandung* : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Sobur, Alex. 2014. *Filsafat Komunikasi Tradisi dan Metode Fenomenologi.* Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Soekanto,Soerjono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. PT RajaGrafindo Persada; Jakarta

Subianto,Benny. 2009. *"Ethnic Politic and the Rise of the Dayak Bureaucrats in Local Election" dalam Deepening Democracy in Indonesia? Direct Election for Local Leaders (Pilkada).* Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto, editor, Pasir Panjang. Singapore : ISEAS.

Soekarno. 2014. *Sarinah: Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia.* Jakarta : Inti Idayu Press.

West dan Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi, Edisi 3*. Salemba Humanika : Jakarta.

Karya Ilmiah / Jurnal

Anigwe, Annette. 2014. *Desertasi Perception of Women in Political Leadership in Nigeria.* Walden University. USA

Arrianie, Lely. 2006. *Kekerasan dalam Komunikasi Politik (Studi Dramaturgis tentang Peristiwa Kekerasan dalam Penyampaian Pesan-pesan Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Bandun*g : Disertasi Doktor Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) Blomgren, Emelie. 2013. Thesis. Woman and Political, A Minor Field Study on Hindrances for Woman's Political Participation in Georgia. University of Georgia.

Dahlan, M. Alwi. 1989. Perkembangan Komunikasi Politik Sebagai Bidang

Kajian. Universitas Indonesia : Jurnal Ilmu Politik.

Hutington, Samuel P,. 1995. Gelombang Demokrasi Ketiga. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Terjemahan dari Judul asli The Third Wave: Democratization.

Permatasari. 2013. Hambatan – Hambatan Partisipasi Politisi Perempuan (Studi Kasus di Provinsi Daerah Yogyakarta). Yogyakarta. Tesis. Ilmu politik Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (UGM).

Slamet, Adiyana. 2008. Komunikasi Politik Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Pada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Dalam Pemilihan

Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008). Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad).

Setyaningrum, Arie. 2005. "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". Jurnal Mandatory Politik Perlawanan . Edisi 2/ Tahun 2/ 2005.

Suparlan, Parsudi, 1980, Desertasi The Javanese in Suriname. University of Illinois Urbana Chicago, USA.

Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta : UGM.

Wirdanengsih. 2002. Perempuan Parlemen (Suatu Kajian Kasus Proses Rekrutmen Politisi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia). Depok. Tesis. Program Studi Antropologi Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI).

Winahyu Dwi Utami. 2010. Komunikasi Politik Anggota Legislatif Provinsi Riau. (Studi Fenomenologi Tentang Keterwakilan Perempuan di DPRD Riau). Bandung. Tesis. Program Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (Unpad).

Zakiyuddin, Ahmad. Komunikasi Politik Jalaluddin Rakhmat Studi Kasus Pemilu 2014 di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Desertasi. Program Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Padjajaran (Unpad).

Sumber lain

Bahan Ajar Komunikasi Politk oleh Adiyana Slamet, S.IP., M.SI. Program Studi Ilmu Komunikasi. Bandung : Unikom.

Dokumen DPRD Provinsi Jawa Barat mengenai Profil Ketua DPRD Jawa Barat Periode 2014-2019.

Fatma Sjoraida, Diah. 2017. Perempuan dalam Politik Indonesia. Tribun Jabar, 20 April 2017.

Susiana, Sali. Representasi Perempuan dalam Politik : Sebuah Keniscayaan. Dari : http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_individu/buku-individu-8.pdf (Diakses pada tanggal 08 Januari 2017: Pukul 22:45 WIB)

Mahi M. Hikmat, Makalah Komunikasi Politik Sunda, 2017.

Mahi M. Hikmat, Politik Tritangtu, 2017.

Undang-Undang / Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.